

BAB III

OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian penulis yang diteliti adalah bank **bjb**. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa laporan keuangan bank **bjb** tahun 2010-2013 yang terkait dengan penyaluran kredit pemilikan rumah dan,tingkat profitabilitas yang ditinjau dari ROA dan ROE.

3.1.1 Gambaran Umum Perusahaan

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. yang dikenal dengan nama bank **bjb**, adalah bank umum yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Banten, pemerintah kota/kabupaten se-Jawa Barat dan Banten, dan publik. Awal berdirinya bank **bjb** bermula dari NV DENIS (De Erste Nederlandsche Indische Shareholding), yang berkedudukan di Bandung dan bergerak di bidang bank hipotek. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan milik Belanda yang dinasionalisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia (RI) Nomor 33 Tahun 1960 tentang Penentuan Perusahaan di Indonesia Milik Belanda yang dinasionalisasi.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendirikan “Perusahaan Daerah (PD) Bank Karja Pembangunan Daerah Djawa Barat” dengan modal dasar dari kas daerah sebesar Rp 2.500.000, berdasarkan

Akta Pendirian No.125 tanggal 19 November 1960 juncto. Akta Perubahan No.152 tanggal 21 Maret 1961 dan Akta Perubahan No.84 tanggal 13 Mei 1961, keduanya dibuat di hadapan Noezar, Notaris di Bandung, serta dikukuhkan dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 7/GKDH/BPD/61 tertanggal 20 Mei 1961 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Karja Pembangunan Daerah Djawa Barat.

Dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No.13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, bentuk hukum Perseroan diubah dari Perusahaan Daerah Bank Karja Pembangunan Daerah Djawa Barat menjadi Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.11/PD-DPRD/1972 tanggal 27 Juni 1972 tentang Penyempurnaan Kedudukan Hukum Bank Karja Pembangunan Daerah Djawa-Barat. Nama PD Bank Karja Pembangunan Daerah Jawa Barat selanjutnya diubah menjadi Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat/BPD Jabar sesuai Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 1/DP-040/PD/1978 Tanggal 27 Juni 1978. Pada tahun 1992 sesuai dengan Surat Keputusan Bank Indonesia No.25/84/KEP/DIR tanggal 2 November 1992 status BPD Jabar meningkat menjadi bank umum devisa. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1995, BPD Jabar memiliki sebutan Bank Jabar dengan logo baru.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No.22 Tahun 1998 tanggal 14 Desember 1998 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan

Terbatas (PT). Perda tersebut dituangkan lebih lanjut pada Akta Pendirian Nomor 4 Tanggal 8 April 1999 juncto Akta Perbaikan Nomor 8 Tanggal 15 April 1999 keduanya dibuat di hadapan Popy Kuntari Sutresna, S.H., Notaris di Bandung yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman RI berdasarkan Surat Keputusan No.C2-7103.HT.01.01.TH.99 tanggal 16 April 1999, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kab/Kodya Bandung di bawah No.871/BH.10.11/IV/99 tanggal 24 April 1999, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.39 tanggal 14 Mei 1999, Tambahan No.2811, bentuk hukum Bank Jabar diubah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT).

Untuk memenuhi meningkatnya kebutuhan masyarakat akan jasa layanan perbankan yang berlandaskan syariah, sesuai dengan izin BI Nomor 2/18/ DpG/DPIP Tanggal 12 April 2000 maka sejak tanggal 15 April 2000 Bank Jabar menjadi bank pembangunan daerah pertama di Indonesia yang menjalankan dual banking system, yaitu memberikan layanan perbankan dengan sistem konvensional dan sistem syariah.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 16 April 2001 menyetujui peningkatan modal dasar Bank Jabar menjadi Rp 1 triliun. Selanjutnya, berdasarkan hasil keputusan RUPS yang diselenggarakan pada tanggal 14 April 2004 berdasarkan Akta Nomor 10 Tanggal 14 April 2004, modal dasar Bank Jabar dinaikkan dari Rp 1 triliun menjadi Rp 2 triliun. Melihat perkembangan prospek usaha yang terus membaik, hasil RUPS tanggal 5 April 2006 menetapkan kenaikan modal dasar Bank Jabar dari Rp 2 triliun menjadi Rp 4 triliun.

Pada bulan November 2007, sebagai tindak lanjut SK Gubernur BI Nomor 9/63/kep.gbi/2007 tentang Perubahan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, dilaksanakan penggantian *call name* dari “Bank Jabar” menjadi “Bank Jabar Banten”.

Pemisahan (*spin off*) Unit Usaha Syariah menjadi anak perusahaan yang berdiri sendiri dengan nama “Bank Jabar Banten Syariah” berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/35/KEP.GBI/2010 tertanggal 30 April 2010 tentang Pemberian Izin Usaha PT Bank Jabar Banten Syariah.

Pada saat pendirian bank bjb syariah memiliki modal disetor sebesar Rp.500.000.000.000 (lima ratus milyar rupiah), kepemilikan saham bank bjb syariah dimiliki oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. dan PT Global Banten Development, dengan komposisi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. sebesar Rp.495.000.000.000 (empat ratus Sembilan puluh lima milyar rupiah) dan PT Global Banten Development sebesar Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

Pada tanggal 6 Mei 2010 bank bjb syariah memulai usahanya, diperoleh Surat Ijin Usaha dari Bank Indonesia Nomor 12/696/DPbS tertanggal 30 April 2010, dengan terlebih dahulu dilaksanakan *cut off* dari Divisi/Unit Usaha Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. yang menjadi cikal bakal bank **bjb** syariah.

Kemudian pada tanggal 21 juni 2011, berdasarkan akta No. 10 tentang penambahan modal disetor yang dibuat oleh Notaris Popy Kuntari Sutresna dan telah

mendapat pengesahan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.10-23713 Tahun 2011 tanggal 25 Juli 2011, Global Banten Development menambahkan modal disetor sebesar Rp.7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah), sehingga saham total seluruhnya menjadi RP.507.000.000.000 (lima ratus tujuh milyar rupiah), dengan komposisi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. sebesar Rp.495.000.000.000 (empat ratus Sembilan puluh lima milyar rupiah) dan PT Global Banten Development sebesar Rp.12.000.000.000 (dua belas milyar rupiah).

Pada tanggal 31 Juli 2012, berdasar kan akta nomor 27 perihal Pelaksanaan Putusan RUPS Lainnya Tahun 2012, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk dan PT Global Banten Development menambahkan modal disetor sehingga total modal PT. Bank Jabar Banten Syariah menjadi sebesar Rp.609.000.000.000,- (enam ratus sembilan milyar rupiah), dengan komposisi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk sebesar Rp.595.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) dan PT Global Banten Development sebesar Rp.14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah).

Berdasarkan Surat dari Ketua Bapepam dan LK No. S-5901/BL/2010 Pada tanggal 29 Juni 2010 tentang Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran Bank Jabar Banten melaksanakan penawaran umum perdana saham dengan harga penawaran sebesar Rp600,00 (enam ratus Rupiah) setiap saham yang dicatatkan dalam Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Juli 2010.

Berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Nomor 26 tanggal 21 April 2010,

Surat Bank Indonesia No.12/78/APBU/Bd tanggal 30 Juni 2010 perihal Rencana Perubahan Logo, serta Surat Keputusan Direksi Nomor 1337/SK/DIR-PPN/2010 tanggal 5 Juli 2010, maka *call name* "Bank Jabar Banten" telah resmi diubah menjadi "bank **bjb**" pada tanggal 2 Agustus 2010.

Bank **bjb** merupakan bank pembangunan daerah pertama yang mencatatkan saham perdananya (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 8 Juli 2010. bank **bjb** menawarkan saham kepada publik sejumlah 2.424.072.500 lembar saham Seri B (termasuk EMSA) dengan harga penawaran Rp600,- per saham dimana dana yang diperoleh dari IPO sekitar Rp1,4 triliun. Pelepasan saham ke masyarakat ini setara dengan 25% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh.

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini dipergunakan oleh bank **bjb** untuk penguatan modal perusahaan dalam rangka mendukung ekspansi kredit, terutama sektor UMKM, perluasan jaringan, dan pengembangan teknologi informasi. Penawaran Umum Perdana Saham bank **bjb** memperoleh minat yang relatif besar dari investor domestik maupun luar negeri. Dalam Penawaran Umum kepada masyarakat tanggal 1, 2 dan 5 Juli 2010, permintaan saham bank **bjb** mengalami *oversubscribed* sebesar 11,2 kali untuk porsi *pooling*.

No.	PEMEGANG SAHAM	JULI	LEMBAR SAHAM	KEPEMILIKAN SBLM IPO	KEPEMILIKAN STLH IPO
		2009	JUL-10	(%)	(%)
A	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	927.498.683.250,00	3.709.994.733,00	51,82%	38,28%
B	Pemerintah Kota & Kab. se - Jawa Barat	572.348.920.250,00	2.289.395.681,00	31,48%	23,61%
	Pemerintah Kota se - Jawa Barat	142.791.233.000,00	570.876.956,00	7,85%	5,89%
1	Kota Bandung	29.000.001.500,00	116.000.006,00	1,60%	1,27%
2	Kota Cirebon	4.259.907.250,00	17.099.629,00	0,23%	0,18%
3	Kota Sukabumi	9.206.130.000,00	36.820.520,00	0,51%	0,36%
4	Kota Bekasi	14.924.256.000,00	59.897.024,00	0,82%	0,62%
5	Kota Bogor	11.684.452.250,00	46.797.809,00	0,64%	0,48%
6	Kota Cimahi	26.000.000.000,00	104.000.000,00	1,43%	1,00%
7	Kota Depok	22.395.492.000,00	89.581.568,00	1,23%	0,92%
8	Kota Tasikmalaya	35.000.000.000,00	60.000.000,00	0,83%	0,62%
9	Kota Banjar	30.250.000.000,00	41.000.000,00	0,56%	0,42%
	Pemerintah Kabupaten se - Jawa Barat	429.629.641.250,00	1.718.558.725,00	23,63%	17,72%
1	Kabupaten Bandung	120.226.741.250,00	680.906.963,00	9,36%	7,02%
2	Kabupaten Cirebon	11.402.270.000,00	53.009.080,00	0,74%	0,55%
3	Kabupaten Karawang	11.579.661.000,00	54.158.644,00	0,75%	0,56%
4	Kabupaten Ciamis	8.180.274.250,00	32.721.097,00	0,45%	0,34%
5	Kabupaten Tasikmalaya	32.738.450.000,00	190.953.800,00	1,80%	1,35%
6	Kabupaten Sukabumi	20.750.000.000,00	83.000.000,00	1,54%	0,86%
7	Kabupaten Subang	21.731.639.500,00	42.329.558,00	0,99%	0,44%
8	Kabupaten Indramayu	21.011.976.750,00	84.047.900,00	1,16%	0,87%
9	Kabupaten Bekasi	18.387.626.000,00	73.550.504,00	1,01%	0,76%
10	Kabupaten Sumedang	12.513.171.000,00	46.052.684,00	0,63%	0,47%
11	Kabupaten Bogor	48.364.516.500,00	193.458.068,00	2,66%	2,00%
12	Kabupaten Cianjur	25.604.190.000,00	102.456.760,00	1,41%	1,08%
13	Kabupaten Kuningan	6.877.050.000,00	27.508.120,00	0,38%	0,28%
14	Kabupaten Majalengka	8.865.667.250,00	35.452.665,00	0,49%	0,32%
15	Kabupaten Garut	6.591.674.500,00	26.366.658,00	0,36%	0,23%
16	Kabupaten Purwakarta	12.804.792.750,00	51.239.173,00	0,70%	0,53%
C	Pemerintah Provinsi Banten	130.147.454.000,00	520.589.856,00	7,86%	5,37%
D	Pemerintah Kota & Kab. se - Banten	188.059.599.000,00	752.238.396,00	20,34%	7,76%
	Pemerintah Kota se - Banten	44.375.868.500,00	177.503.394,00	2,44%	1,83%
1	Kota Tangerang	29.875.848.500,00	119.500.354,00	1,64%	1,23%
2	Kota Cilegon	14.500.000.000,00	58.000.000,00	0,80%	0,60%
	Pemerintah Kabupaten se - Banten	143.683.750.500,00	574.735.000,00	7,90%	5,93%
1	Kabupaten Serang	36.077.812.750,00	144.311.253,00	1,96%	1,49%
2	Kabupaten Tangerang	72.526.547.250,00	289.306.189,00	3,95%	2,95%
3	Kabupaten Lebak	8.974.788.500,00	55.899.154,00	0,49%	0,37%
4	Kabupaten Pandeglang	26.304.602.000,00	105.218.408,00	1,45%	1,09%
TOTAL PEMDA		1.888.054.666.500,00	7.272.218.666,00	100,00%	75,00%
MASYARAKAT (IPO 07 JULI 2010)		606.018.125.000,00	2.424.072.500,00	-	25,00%
TOTAL		2.242.072.791.500,00	9.696.295.166,00	100,00%	100,00%

Sumber: www.bjb.co.id

Tabel 3.1
Kepemilikan Saham bank bjb

3.1.2 Visi dan Misi bank bjb

3.1.2.1 Visi bank bjb

Menjadi 10 bank terbesar dan berkinerja baik di Indonesia. Merupakan penjabaran dari keinginan yang kuat dari segenap stakeholder Bank bjb untuk membawa Bank bjb tumbuh berkembang menjadi salah satu dari 10 bank terbesar dan berkinerja baik di kancah nasional.

3.1.2.2 Misi bank bjb

Untuk mencapai visinya maka bank **bjb** memiliki misi sebagai berikut :

1. Penggerak dan pendorong laju pembangunan di daerah.
2. Melaksanakan penyimpanan uang daerah.
3. Salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Bank bjb menjadi 10 bank terbesar dan berkinerja baik di Indonesia, Bank bjb telah melakukan beberapa perubahan salah satunya perubahan budaya perusahaan. Budaya perusahaan tersebut mencerminkan semangat Bank bjb dalam menghadapi persaingan perbankan yang dinamis. Nilai-nilai perusahaan yang dianut Bank bjb adalah S.P.I.R.I.T :

Tabel 3.2
Nilai-nilai Perusahaan bank bjb

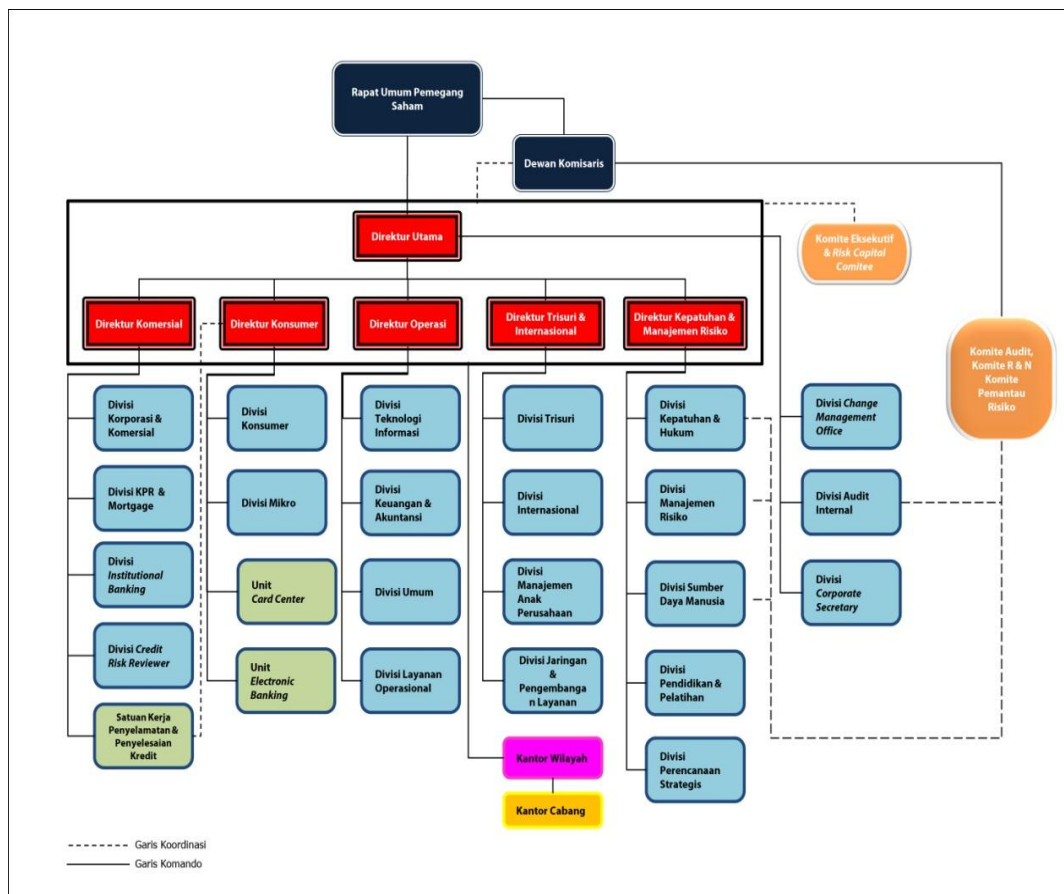
Corporate Value	Perilaku Utama
<i>Service excellence,</i>	1. Ramah, tulus, kekeluargaan 2. Selalu memberikan pelayanan prima
<i>Professionalism</i>	3. Cepat, tepat, akurat 4. Kompeten dan bertanggung jawab 5. Memahami dan melaksanakan ketentuan perusahaan
<i>Integrity</i>	6. Konsisten, disiplin, dan penuh semangat 7. Menjaga citra bank melalui perilaku terpuji dan menjunjung tinggi etika

<i>Respect</i>	8. Fokus pada nasabah 9. Peduli pada lingkungan
<i>Intelligence</i>	10. Selalu memberikan solusi yang terbaik 11. Berkeinginan kuat untuk mengembangkan diri 12. Menyukai perubahan positif
<i>Trust</i>	13. Menumbuhkan transparansi, kebersamaan dan kerja sama yang sehat 14. Menjaga rahasia bank dan perusahaan

Sumber: www.bankbjb.co.id

3.1.3 Struktur Organisasi bank bjb

Struktur organisasi merupakan susunan yang menggambarkan berbagai fungsi sesuai dengan bidangnya berdasarkan hirarki dan saluran kewenangan yang berlaku dalam mencapai suatu tujuan perusahaan. Struktur organisasi menggambarkan pembagian tugas dan wewenang telah dijalankan sesuai dengan fungsinya masing-masing atau tidak. Dibawah ini adalah susunan struktur organisasi Bank bjb sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 667/SK/DIR-PS/2013 tanggal 29 Oktober 2013 sebagai berikut :



Gambar 3.1
Struktur Organisasi bank bjb
 Sumber: www.bankbjb.co.id

3.1.4 Deskripsi Kerja (Job Description)

Dari gambar struktur organisasi di atas, dapat dijelaskan mengenai tugas dari bidangnya masing-masing. Adapun deskripsi tugas Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direktur Utama, Direktur Komersial, Direktur Konsumer, Direktur Operasional, Direktur Trisuri dan Internasional dan Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko di Bank bjb sebagai berikut :

1. Rapat Umum Pemegang Saham (*General Meeting of Shareholders*)

Merupakan organ dari perusahaan dengan Perseroan Terbatas yang memiliki kewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Kewenangan RUPS, bentuk dan luasnya ditentukan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan. Dalam mengambil setiap keputusan, RUPS memiliki kewenangan untuk memperoleh keterangan-keterangan mengenai Perseroan, baik dari Direksi maupun Dewan Komisaris. Keterangan-keterangan itu merupakan landasan bagi RUPS untuk menentukan kebijakan dan langkah strategis Perseroan dalam mengambil keputusan sebagai sebuah badan hukum. Mekanisme penyampaian keterangan dan keputusan itu disusun secara teratur dan sistematis sesuai agendanya. Dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), para peserta tidak dapat memberikan keterangan dan keputusan diluar agenda rapat, kecuali RUPS itu sendiri dihadiri oleh semua pemegang saham dan mereka menyetujui penambahan agenda rapat itu dengan sangat bulat.

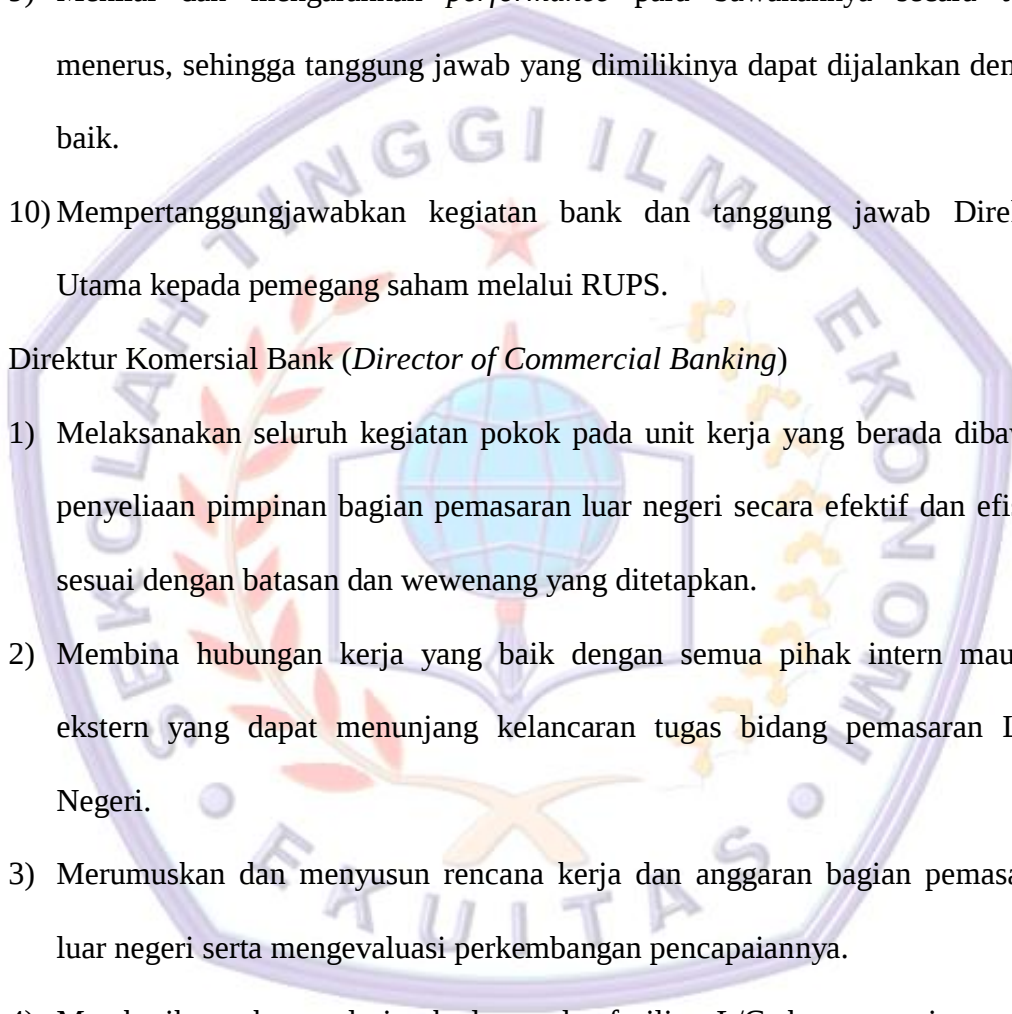
2. Dewan Komisaris (*Board of Commisioner*)

Dewan komisaris mempunyai tugas untuk menetapkan kebijakan untuk menjalankan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap PT. Bank bjb. Untuk melaksanakan tugas tersebut dewan komisaris mempunyai tugas, antara lain:

- 1) Melaksanakan kegiatan pengawasan atau kebijakan Direksi dan meminta pertanggungjawaban Direksi sesuai dengan ketentuan dalam akta pendirian dan anggaran dasar bank.

- 2) Melakukan kegiatan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan bank baik oleh Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang (RPJ), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahunan, ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, peraturan perundang-undangan untuk kepentingan bank dan sesuai dengan maksud dan tujuan bisnis bank.
- 3) Menyetujui dan memberi arahan atas rencana kerja, anggaran pendapatan, dan biaya serta rencana kerja, anggaran pendapatan dan biaya serta rencana pengembangan usaha bank yang dibuat oleh Direksi.
- 4) Mengevaluasi dan *review* hasil pencapaian rencana kerja, anggaran pendapatan dan biaya serta rencana pengembangan usaha bank.
- 5) Bertindak independen, dalam arti tidak mempunyai benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara sendiri dan kritis, baik dalam hubungan satu sama lain maupun terhadap Direksi.
- 6) Menyusun program kerja dan target kinerja Dewan Komisaris tiap tahun serta mekanisme *review* terhadap kinerja Dewan Komisaris.
- 7) Mengawasi pelaksanaan kegiatan manajemen risiko.
- 8) Memantau dan mengevaluasi kinerja Direksi.
- 9) Memantau kepatuhan Bank bjb terhadap peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta komitmen kepada Bank Indonesia dan pihak-pihak lainnya.

- 10) Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Jangka Panjang (RPJ), Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RAPJ).
 - 11) Mengawasi pelaksanaan kegiatan pemberian kredit sesuai dengan surat keputusan Bank Indonesia yang berlaku.
 - 12) Meminta penjelasan atau pertanggungjawaban Direksi mengenai perkembangan kualitas portofolio kegiatan perkreditan secara keseluruhan termasuk kredit yang diberikan kepada pihak terkait dengan bank dan debitur.
 - 13) Komisaris bank bersama-sama atau sendiri setiap waktu berhak memeriksa semua pembukuan, surat, dan alat bukti lainnya.
3. Direktur Utama (*President Director*)
- 1) Menjalankan kegiatan sebagai penanggung jawab dan memegang wewenang perusahaan yang diberikan kepadanya sehingga maksud dan tujuan (visi dan misi) dapat tercapai dengan asas perbankan yang sehat.
 - 2) Mewujudkan pelaksanaan RJP, RBB dan RKAP, termasuk pencapaian target keuangan dan non keuangan.
 - 3) Melakukan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam setiap kegiatan usaha Bank bjb pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasional.
 - 4) Menetapkan kebijakan Bank bjb yang bersifat strategis di bidang *human capital* kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai.
 - 5) Menetapkan pelaksanaan kepengurusan Bank bjb.
 - 6) Menetapkan strategi kegiatan usaha dalam mencapai tujuan dan sasaran bank.

- 
- 7) Menetapkan rencana kerja jangka panjang dan memberikan laporan anggaran pendapatan dan biaya bank untuk periode yang ditentukan.
 - 8) Mewujudkan pelaksanaan fungsi pengendalian internal yang meliputi, audit internal, audit eksternal, manajemen risiko dan kepatuhan bank.
 - 9) Menilai dan mengarahkan *performance* para bawahannya secara terus menerus, sehingga tanggung jawab yang dimilikinya dapat dijalankan dengan baik.
 - 10) Mempertanggungjawabkan kegiatan bank dan tanggung jawab Direktur Utama kepada pemegang saham melalui RUPS.
4. Direktur Komersial Bank (*Director of Commercial Banking*)
- 1) Melaksanakan seluruh kegiatan pokok pada unit kerja yang berada dibawah penyeliaan pimpinan bagian pemasaran luar negeri secara efektif dan efisien sesuai dengan batasan dan wewenang yang ditetapkan.
 - 2) Membina hubungan kerja yang baik dengan semua pihak intern maupun ekstern yang dapat menunjang kelancaran tugas bidang pemasaran Luar Negeri.
 - 3) Merumuskan dan menyusun rencana kerja dan anggaran bagian pemasaran luar negeri serta mengevaluasi perkembangan pencapaiannya.
 - 4) Memberikan rekomendasi terhadap usulan fasilitas L/C ekspor atau impor.
 - 5) Menandatangani surat-surat laporan-laporan serta dokumen-dokumen lainnya dalam rangka aktivitas bagian pemasaran luar negeri sesuai dengan kewenangan yang berlaku.

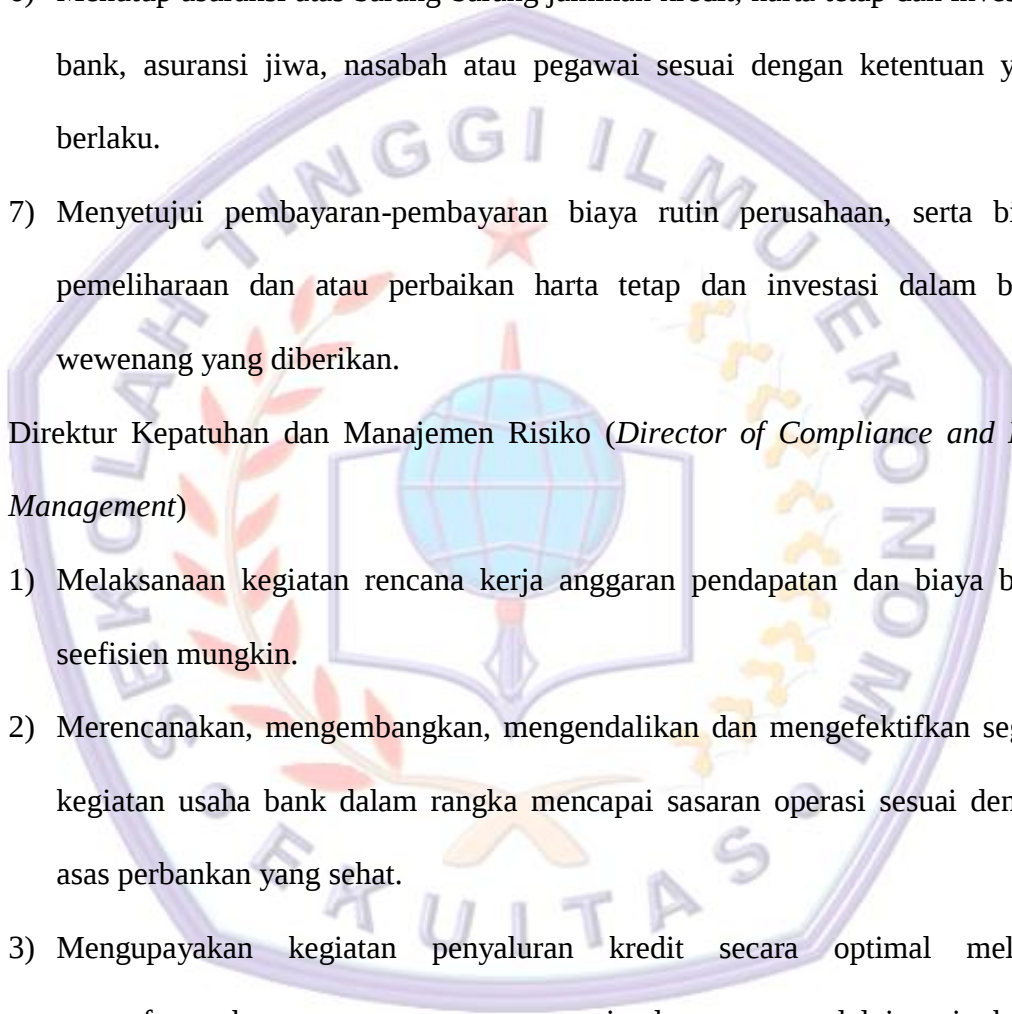
- 6) Menandatangani cek atau penarikan dengan cara lainnya atas rekening nasabah dalam batas wewenang yang diberikan.

5. Direktur Konsumer Bank (*Director of Consumer Banking*)

- 1) Melaksanakan seluruh kegiatan pratek pada unit kerja secara efektif dan efisien dan wewenang yang ditetapkan serta menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap seksi pemasaran kredit dalam berbagai kegiatan pemasaran kredit.
- 2) Membina hubungan kerja yang baik dengan semua pihak intern maupun ektern yang dapat menunjang kelancaran tugas bidang pemasaran dalam negeri.
- 3) Membantu dalam merumuskan dan menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan serta mengevaluasi perkembangan pencapaiannya.
- 4) Memberikan rekomendasi terhadap memorandum pengusulan analisa kredit komersial segmen ritel.
- 5) Menetapkan garis-garis besar kebijaksanaan umum pengelolaan *Consumer Banking*.
- 6) Menandatangani surat-surat, laporan-laporan serta dokumen-dokumen lainnya dalam rangka aktifitas bidang pemasaran dalam negeri sesuai dengan kewenangan yang berlaku.

6. Direktur Operasional (*Director of Operational*)

- 1) Merumuskan usulan rencana kerja dan anggaran tahunan unit.
- 2) Mengelola kesekretariatan, administrasi umum dan kearsipan.
- 3) Melakukan perbaikan atau penyelesaian temuan hasil audit.

- 
- 4) Membina hubungan kerja yang baik dengan semua pihak intern dan ekstern yang dapat menunjang kelancaran tugas bidang operasional.
 - 5) Merumuskan dan menyusun rencana kerja dan anggaran baian operasional serta mengevaluasi perkembangan pencapaiannya.
 - 6) Menutup asuransi atas barang-barang jaminan kredit, harta tetap dan investasi bank, asuransi jiwa, nasabah atau pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 7) Menyetujui pembayaran-pembayaran biaya rutin perusahaan, serta biaya pemeliharaan dan atau perbaikan harta tetap dan investasi dalam batas wewenang yang diberikan.
 7. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko (*Director of Compliance and Risk Management*)
 - 1) Melaksanaa kegiatan rencana kerja anggaran pendapatan dan biaya bank seefisien mungkin.
 - 2) Merencanakan, mengembangkan, mengendalikan dan mengefektifkan segala kegiatan usaha bank dalam rangka mencapai sasaran operasi sesuai dengan asas perbankan yang sehat.
 - 3) Mengupayakan kegiatan penyaluran kredit secara optimal melalui pemanfaatan kesempatan pasar secara optimal terutama melalui peningkatan instrument dana masyarakat.
 - 4) Sebagai kepala bagian komite pinjaman dalam suatu organisasi perkreditan bank yang mengorganisasikan pemberian kredit secara baik dan sehat.

- 5) Menyetujui aplikasi kegiatan kredit dalam batas wewenang dan merekomendasikan kepada direktur utama mengenai prospek kredit yang baik diluar wewenangnya.
- 6) Pengembangan system manajemen risiko, meliputi pengembangan budaya manajemen risiko, sosialisasi *Standard Operating Procedure* (SOP) secara berkala melalui *Branch Risk Control Officer* (BRCO), pelaksanaan *operational risk self assessment*. Pelaksanaan *stress testing* untuk menilai ketahanan bank dalam menghadapi kejadian risiko yang bersifat ekstrim.
- 7) Memelihara kekayaan bank dalam melalui mekanisme internal audit masing-masing unit kerja sehingga tetap mampu menjadikan kondisi bank yang sehat.
- 8) Memelihara keefektifan kegiatan operasi bank melalui service secara menyeluruh terhadap produktifitas dan efisiensi tata kerja secara prosedur operasi yang berlaku.
8. Direktur Trisuri dan Internasional (*Director of International and Treasury*)
Bertugas mengontrol transaksi valuta asing untk memperoleh keuntungan, jual beli valuta asing, melakukan benchmark untuk melakukan di grup dengan perusahaan-perusahaan di luar negeri.
9. Divisi Anak Perusahaan (*Division of Subsidiary Companies Management*)
Bertugas mengelola anak perusahaan, seperti **bjb** ekuitas yang merupakan anak perusahaan dari bank **bjb**.
10. Divisi Konsumer (*Division of Consumer Banking*)
Bertugas menyalurkan kredit untuk keperluan konsumtif, seperti pemberian Kredit untuk PNS dalam program kredit rumah/KPR.

11. Divisi Card Center (*Division of Card Center*)

Bertugas pengelolaan kartu *ATM*, kartu kredit, internet *banking*.

12. Divisi Pengelolaan Jaringan (*Division of Network Service Development*)

Bertugas mengelola pembuatan jaringan kantor, pengembangan kantor kas, *payment point*, dll.

13. Divisi TI (*Division of Information Technology*)

Bertugas mengontrol serta membangun jaringan di bank BJB, dan segala hal yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi.

14. Divisi Layanan Operasional (*Division of Operation Services*)

Bertugas memberikan pelayanan transaksi kepada para nasabah.

15. Divisi Umum (*Division of General Administration*)

Bertugas untuk pengadaan barang, pencairan dana, yang disalurkan pada divisi lain.

16. Divisi Keuangan dan Akuntansi (*Division of Finance & Accouting*)

Bertugas melakukan pengolahan keuangan di bank.

17. Divisi *Corporate Secretary*

Bertugas melakukan publikasi informasi kepada masyarakat, mengelola informasi serta menjalin hubungan dengan nasabah

18. Kantor Cabang (*Branch Office*)

Bertugas melakukan transaksi perbankan seperti penyimpanan uang, penarikan, kredit nasabah, dll.

19. Divisi SDM (*Division of Human Capital*)

Bertugas untuk melakukan proses rekrutmen, pendayagunaan, pengembangan, dan pemeliharaan sumber daya manusia secara efektif dan efisien.

20. Divisi Pendidikan dan Pelatihan (*Division of Education & Training*)

Bertugas melakukan pembinaan, serta pelatihan kepada pegawai agar lebih kompeten.

21. Divisi *Change Management Office*

Bertugas memonitoring proyek yg ada, serta konseling untuk para pegawainya.

22. Divisi Audit Internal (*Division of Internal Audit*)

Bertugas memeriksa semua kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di setiap cabang maupun divisi.

23. Divisi Perencanaan Strategis (*Division of Strategy Planning*)

Bertugas merencanakan hal2 strategis utk diberlakukan di setiap cabang/divisi utk kemajuan bank.

3.1.5 Produk – produk bank bjb

1. Penghimpunan dana yang dilakukan diarahkan kepada dana – dana ritel/ perorangan disamping mempertahankan nasabah korporasi maupun instansi dan departemen terkait. Penghimpunan dana dilakukan melalui produk – produk sebagai berikut :

- 1) Giro

1. **bjb** Giro Rupiah

2. **bjb** Giro Valas

- 2) Tabungan

1. Tabungan **bjb** Tandamata (Tabungan Anda Masa Datang)
2. Tabungan **bjb** Tandamata *Gold*
3. Tabungan **bjb** Tandamata Dollar
4. Tabungan **bjb** Tandamata Bisnis
5. Tabungan **bjb** Tandamata berjangka
6. Tabungan **bjb** Tandamata Purnabhakti
7. Simpeda (Simpanan Pembangunan Daerah)
8. TabunganKu

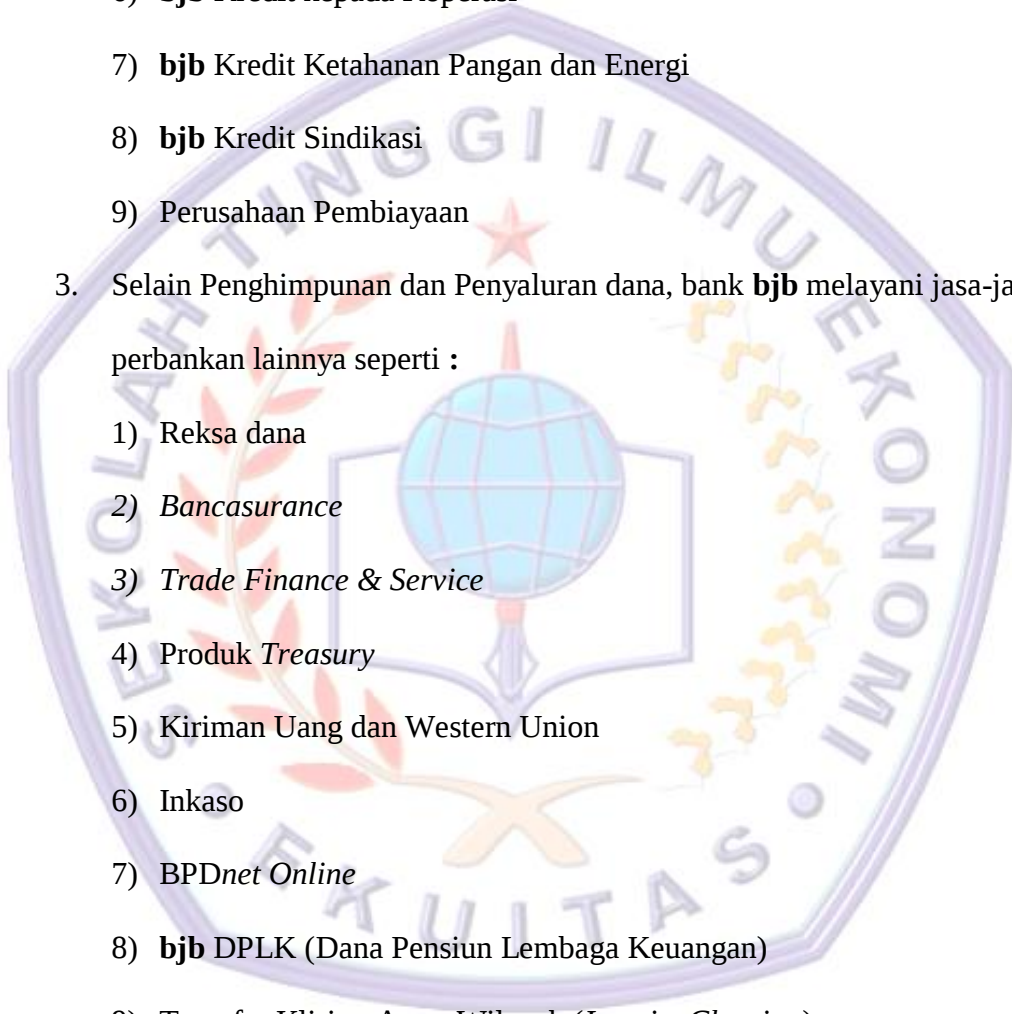
3) Deposito

1. **bjb** Deposito Berjangka
2. **bjb** Deposito Suka - suka
3. **bjb** Deposito Valas
4. **bjb** Deposito *On Call*
5. **bjb** Deposito Diskonto

2. Penyaluran Dana dilakukan melalui produk – produk sebagai berikut:

1) Kredit Umum

1. **bjb** kredit Modal Kerja Umum(KMKU)
2. **bjb** Kredit Investasi Umum (KIU)
3. **bjb** Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK)
4. **bjb** Kredit Mikro Utama bank **bjb** (Kredit Usaha Rakyat)
5. **bjb** Kredit Cinta Rakyat

- 
- 2) **bjb** Kredit Resi Gudang
 - 3) **bjb** Kredit Guna Bhakti (KGB)
 - 4) **bjb** Kredit Koperasi Karyawan
 - 5) **bjb** KPR
 - 6) **bjb** Kredit kepada Koperasi
 - 7) **bjb** Kredit Ketahanan Pangan dan Energi
 - 8) **bjb** Kredit Sindikasi
 - 9) Perusahaan Pembiayaan
 3. Selain Penghimpunan dan Penyaluran dana, bank **bjb** melayani jasa-jasa perbankan lainnya seperti :
 - 1) Reksa dana
 - 2) *Bancassurance*
 - 3) *Trade Finance & Service*
 - 4) Produk *Treasury*
 - 5) Kiriman Uang dan Western Union
 - 6) Inkaso
 - 7) *BPDnet Online*
 - 8) **bjb** DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan)
 - 9) Transfer Kliring Antar Wilayah (*Intecity Clearing*)
 - 10) Jaminan Bank (Bank Garansi)
 - 11) *Mobile Banking* (M-ATM Bersama)
 - 12) Layanan Nasabah **bjb** *Precious*
 - 13) Jasa Layanan Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)

14) Layanan *Weekend Banking*

15) Layanan Kas Mobil

3.2. Metode Penelitian

3.2.1. Metode yang digunakan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif. Metode deskriptif adalah untuk mengetahui gambaran mengenai variabel bebas dan terikat sedangkan metode verifikatif untuk mengetahui pengaruh antar variabel yaitu variabel Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) terhadap Profitabilitas.

Menurut Sugiyono (2012:2) metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dan verifikatif.

Metode deskriptif menurut Sugiyono (2012:147) adalah sebagai berikut.

“Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi”.

Sedangkan metode verifikatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan kualitas antar variabel melalui suatu pengujian hipotesis melalui suatu perhitungan statistik.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat dikatakan bahwa metode analisis deskriptif merupakan metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian yang ada, sehingga metode ini harus diadakan akumulasi data. Sedangkan metode verifikatif bertujuan untuk mengetahui kejelasan hubungan suatu variabel (menguji hipotesis) melalui pengumpulan data.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan perhitungan statistik. Penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang diteliti. Verifikatif berarti menguji teori dengan pengujian suatu hipotesis apakah diterima atau ditolak. Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui hubungan yang signifikan antar variabel yang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan penulis adalah dengan cara melihat fenomena/gejala yang muncul di masyarakat untuk dijadikan objek penelitian kemudian hipotesis yang sudah ditentukan akan diuji melalui analisis data.

3.2.2. Operasional Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2009:3), operasional variabel merupakan suatu atribut atau sifat dari orang atau objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.

Berdasarkan judul penelitian “Pengaruh Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) terhadap Profitabilitas pada bank **bjb**” terdapat variabel-variabel adalah sebagai berikut :

1. Variabel Independen atau variable bebas (X)

Menurut Kuncoro (2009:24), menyatakan bahwa variabel independen adalah variabel yang identik dengan variabel bebas, penjelas dan biasanya dianggap sebagai variabel penyebab dari variabel dependen. Berdasarkan judul terdapat satu variabel bebas (X) dalam penelitian ini.

2. Variabel dependen atau variabel tidak bebas atau variabel terikat (Y)

Variabel dependen adalah variabel yang keberadaannya merupakan sesuatu yang dipengaruhi oleh variabel independen. Pada penelitian ini terdapat variabel dependen yaitu Profitabilitas (Y).

Tabel 3.3 Operasional Variabel

Variabel	Konsep	Indikator	Skala pengukuran
Variabel X Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR)	Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yaitu kredit yang diberikan oleh bank, kepada debitur untuk digunakan membeli atau membayar sebuah bangunan rumah tinggal dengan tanahnya guna dimiliki atau dihuni atau dipergunakan sendiri. (Firdaus dan Ariyanti 2011:14)	Perkembangan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada bank bjb	Rasio
Variabel Y Profitabilitas	Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan. (Kasmir 2012:196)	Perkembangan Profitabilitas yang diukur berdasarkan ROA dan ROE	Rasio

Sumber : Data diolah oleh penulis 2014

3.2.3. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel

Menurut Sugiyono (2009:115) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan periode 2010.1 – 2013.4 pada bank **bjb**.

Menurut Sugiyono (2009:116) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu. Maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dalam sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk sampel yang diambil dari populasi harus betul – betul representatif (mewakili).

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel yang bertujuan atau *purposive sampel*. *Purposive sample* adalah sampel yang bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Dengan arti lain dalam teknik pengambilan sampel ini tidak memberi peluang kepada yang lain terpilih sebagai sampel. Sampel yang digunakan adalah laporan keuangan periode 2010.1 – 2013.4 yang berjumlah 16 observasi pada bank **bjb**.

3.2.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan.

Menurut Sugiyono (2012:137) sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung, contohnya dari literatur-literatur, buku-buku laporan yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Sumber data yang digunakan adalah laporan keuangan dan *Annual Report* bank **bjb** Periode 2009-2013.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Studi Dokumentasi (*Documentary Research*)

Yaitu pengumpulan data dengan mencari dokumentasi yang sesuai dengan obyek yang dianalisis untuk memperoleh data sekunder.

2. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Penulis melakukan penelitian yang dilakukan berdasarkan teori-teori yang terdapat dalam buku-buku, naskah-naskah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3.2.5. Rancangan Pengujian Hipotesis

Rancangan pengujian hipotesis digunakan untuk menganalisis sejauh mana pengaruh penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) terhadap Profitabilitas, maka data yang sudah terkumpul akan dianalisis dan diteliti melalui metode dokumentasi. Data-data yang berkaitan dengan variabel tersebut dikumpulkan lalu diolah dengan menggunakan perangkat lunak *Statistic Program Social Science (SPSS) V.20.00 for windows*. setelah data diolah kemudian dilakukan analisis dan pengujian hipotesis dengan langkah – langkah sebagai berikut :

3.2.5.1.Persamaan Regresi Linier

Analisis regresi dalam penelitian ini digunakan untuk menyatakan hubungan fungsional antara variabel independen dan variabel dependen. Adapun bentuk model regresi sederhana adalah sebagai berikut :

$$Y = a + bX$$

Sumber: Sugiyono (2011:261)

Dimana

Y = variabel terikat (ROA dan ROE)

X = variabel bebas (Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah)

a = Konstanta Regresi

b = Koefisien regresi

3.2.5.2. Analisis koefisien korelasi

Analisis ini bertujuan untuk meneliti keeratan antara variabel X, yaitu Penyaluran Kredit dengan variabel Y, yaitu Profitabilitas (ROA dan ROE) dimana hubungan antara variabel – variabel tersebut diuji dengan menggunakan rumus korelasi pearson guna mengetahui koefisien korelasi. Angka koefisien korelasi (p) yang pada umumnya dapat ditaksir dengan (r).

$$r = \frac{n \sum XY - (\sum X) (\sum Y)}{\sqrt{\left(n \sum (X)^2 - (\sum X)^2 \right) \left(n \sum (Y)^2 - (\sum Y)^2 \right)}}$$

Sumber: Sugiyono (2011:228)

Dimana ;

r = koefisien korelasi

X = Penyaluran Kredit

Y = Profitabilitas

n = jumlah sampel yang digunakan

nilai koefisien korelasi harus terdapat dalam batasan – batasan nilai - $1 < p < +1$. Tanda positif menunjukkan adanya hubungan positif atau hubungan langsung antara kedua variabel yang berarti setiap kenaikan nilai – nilai X akan diikuti dengan kenaikan nilai – nilai Y dan setiap penurunan nilai – nilai X akan diikuti penurunan nilai – nilai Y. Sedangkan tanda negatif menunjukkan adanya hubungan yang berarti setiap kenaikan nilai – nilai X

akan diikuti dengan penurunan nilai – nilai Y dan setiap penurunan nilai – nilai X akan diikuti dengan kenaikan nilai – nilai Y, Dimana kriterianya adalah sebagai berikut ;

1. Apabila r sama dengan $+1$ atau mendekati $+1$, maka korelasi antara kedua variabel dikaitkan sangat kuat dan searah, apabila X naik maka Y naik juga.
2. Apabila r sama dengan 0 atau mendekati 0 , maka hubungan antara kedua variabel sangat rendah atau tidak terdapat hubungan sama sekali.
3. Apabila r sama dengan -1 atau mendekati -1 , maka korelasi antara kedua variabel dikaitkan sangat kuat dan berlawanan arah, apabila X naik maka Y turun.

Hasil dari koefisien korelasi tersebut lalu dihubungkan dengan interpretasi koefisien korelasi dari Sugiyono yang terdapat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.4 Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	sedang
0, 60 – 0, 799	kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono (2011:231)

3.2.5.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian ini dilakukan untuk mengukur atau mengetahui seberapa besar perubahan variabel terikat mempengaruhi variabel bebasnya. Untuk menelusuri hal tersebut dapat ditentukan dengan menghitung koefisien determinasi dengan rumus sebagai berikut :

$$\mathbf{Kd = r^2 \times 100\%}$$

Sumber: Sugiyono (2009:231)

Keterangan:

Kd = Seberapa jauh perubahan variabel Y dipengaruhi variabel X

r^2 = Koefisien korelasi pangkat dua

3.2.5.4 Uji Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat (Sugiyono, 2009:259). Tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas secara signifikan terdapat hubungan dengan variabel tidak bebas dengan melakukan hipotesis sebagai berikut:

$H_0 : \beta_1 = 0$: Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas bank **bjb**.

$H_1 : \beta_1 \neq 0$: Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas bank **bjb**.

Tingkat keyakinan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 95% dengan taraf nyata 5% ($\alpha = 0,05\%$). Tingkat signifikansi 0,05 atau 5% artinya kemungkinan besar hasil penarikan kesimpulan memiliki probabilitas 95% atau toleransi sebesar 5%. Adapun derajat kepercayaan yang digunakan dalam penelitian ini sebesar $df = n - 2$.

Sedangkan kaidah keputusan yang ditetapkan dalam penelitian ini seperti yang tercantum di bawah ini:

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} < -t_{tabel}$, maka H_0 ditolak (signifikan)

Jika $-t_{tabel} \leq t_{hitung}$, maka H_0 diterima (tidak signifikan)

Atau didasarkan pada nilai probabilitas yang didapatkan dari hasil pengolahan data melalui program SPSS Versi 20:

- 1) Jika probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima.
- 2) Jika probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak.

Pada uji t, nilai probabilitas dapat dilihat pada hasil pengolahan dari program SPSS pada tabel *coefficients* kolom sig atau *significance*.